

---

## **APAKAH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN TINGKAT PENGANGGURAN BERDAMPAK TERHADAP PEREKONOMIAN DI KERESIDENAN BANYUMAS?**

**Samuel Fery Purba\***

Pusat Riset Ekonomi Perilaku dan Sirkuler, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia

Email: samu003@brin.go.id

**\*Penulis Korespondensi**

---

### **ABSTRAK**

Salah satu indikator pertumbuhan ekonomi adalah pembangunan manusia yang berkualitas, yang diukur dalam tiga aspek: kesehatan, standar hidup yang layak, dan pendidikan. Ketimpangan pembangunan manusia di wilayah Keresidenan Banyumas masih terjadi, sehingga berpengaruh terhadap perekonomian daerah. Penelitian ini bertujuan mengkaji korelasi rata-rata lama sekolah, indeks pembangunan manusia, dan tingkat pengangguran terhadap PDRB perkapita (Proksi pertumbuhan ekonomi) di Keresidenan Banyumas. Data sekunder penelitian bersumber dari laman Badan Pusat Statistik. Metode penelitian dengan regresi data panel, dengan data periode 2017 - 2022 dan data silang objek 4 wilayah di Keresidenan Banyumas yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Banjarnegara. *Fixed Effect Model* (FEM) menjadi model estimasi terpilih dalam menjawab hipotesis penelitian. Temuan penelitian menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia berkorelasi positif signifikan terhadap PDRB per kapita. Tingkat pengangguran terbuka berkorelasi negatif signifikan terhadap PDRB per kapita. Di sisi lain, rata-rata lama sekolah berkorelasi positif tapi tidak signifikan terhadap PDRB per kapita. Kesimpulan penelitian adalah terdapat hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia dan tingkat pengangguran terhadap perekonomian di Keresidenan Banyumas.

**Kata Kunci:** *keresidenan banyumas, rata-rata lama sekolah, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia*

---

## **DOES HUMAN DEVELOPMENT INDEX AND UNEMPLOYMENT RATE HAVE AN IMPACT ON BANYUMAS RESIDENCY'S ECONOMY?**

### **ABSTRACT**

*One of the indicators of economic growth is quality human development, which is measured in three aspects: a decent standard of living, health, and education. Inequality in human development persists in the Banyumas Residency area, impacting the regional economy. The aim of the study is to examine the correlation between mean years of schooling, human development index, and unemployment rate to GRDP per capita (proxy of economic growth) in Banyumas Residency, Central Java. Secondary research data comes from the Statistics Indonesia website. The research method uses panel data regression, consisting of time series data for 2017-2022 and cross-sectional data from 4 areas in Banyumas Residency, namely Banyumas Regency, Purbalingga Regency, Cilacap Regency, and Banjarnegara Regency. The Fixed Effect Model is the chosen estimation model in answering the research hypothesis. The research findings state that the human development index has a significant positive correlation with GRDP per capita. The unemployment rate has a significant negative correlation with GRDP per capita. Meanwhile, the mean years of schooling has an insignificant positive correlation with GRDP per capita. The conclusion of the study is that there is a relationship between the Human Development Index and the unemployment rate on the economy in the Banyumas Residency.*

**Keywords:** *banyumas residency, mean years of schooling, unemployment rate, human development index*

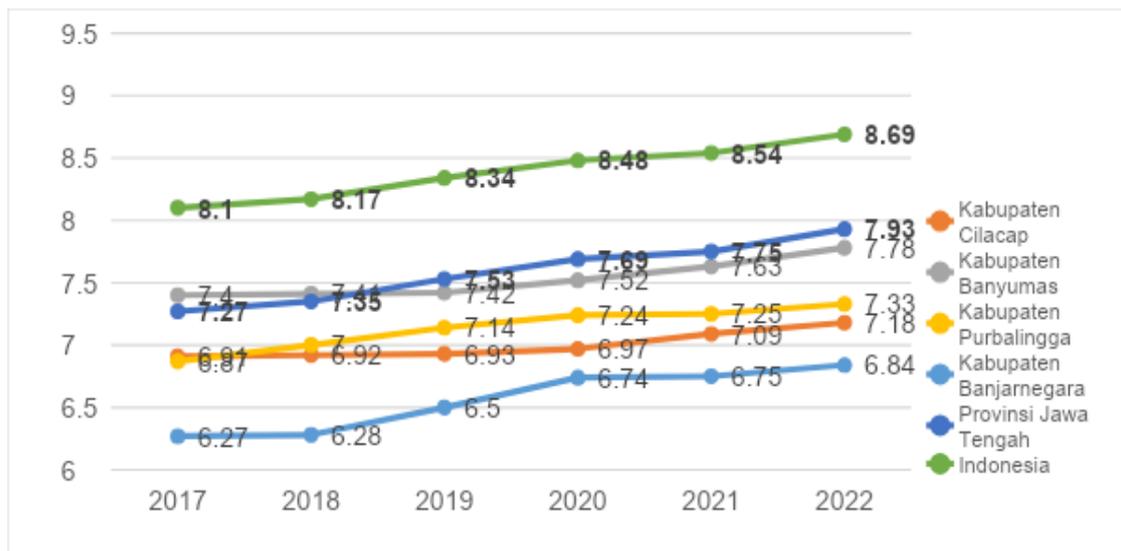
## PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang diarahkan pada semua daerah memiliki tujuan yang sama yaitu pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu metrik acuan dalam mengukur tingkat kesuksesan pembangunan ekonomi di daerah dan nasional. Pengukuran pertumbuhan ekonomi di daerah dihitung dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per-kapita. PDRB dapat menggambarkan besarnya kegiatan perekonomian secara general di suatu daerah. Pembangunan ekonomi adalah kondisi multidimensi yang mengkaitkan perubahan organisasi dan orientasi dalam seluruh struktur sosial dan sistem ekonomi dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat, penurunan ketimpangan pendapatan, dan pembangunan manusia (Todaro & Smith, 2011).

Pembangunan manusia yang berkualitas menjadi salah satu metrik acuan terciptanya pertumbuhan ekonomi, karena semakin baik kualitas kehidupan masyarakat maka semakin baik gambaran kesejahteraan masyarakat dengan terpenuhinya kelayakan dan kebutuhan hidup, secara sosial dan ekonomi (Mirza, 2011). Pengukuran mutu pembangunan manusia bersumber dari *United Nations Development Program* (UNDP), yang memberitahukan konsep perhitungan mutu modal manusia atau sering disebut Indeks Pembangunan Manusia atau IPM (Badan Pusat Statistik, 2023). Pengukuran IPM di Indonesia dibentuk dari 3 komponen indikator yaitu pendidikan, kesehatan, dan pendapatan sebagai standar kehidupan layak. Ketiga komponen indikator dalam indeks pembangunan manusia memberikan pengaruh terhadap perekonomian (Alexander, 2019). IPM yang berkualitas diharapkan memberikan dampak terhadap pembangunan manusia, sehingga dapat menghasilkan kebijakan pemerintahan dengan tujuan untuk pembangunan daerah yang semakin merata.

Keresidenan Banyumas adalah salah satu keresidenan di Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari 4 wilayah yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Purbalingga. Pembangunan daerah di Keresidenan Banyumas bergantung pada kondisi kualitas pembangunan manusia, dengan jumlah masyarakat usia produktif yang cukup besar dan berkualitas dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi di daerah. Selain itu, banyaknya jumlah masyarakat usia produktif yang berkualitas dapat meningkatkan pembangunan daerah di Keresidenan Banyumas. Jumlah masyarakat pada angkatan kerja di Keresidenan Banyumas pada tahun 2022 mencapai 2.802.625 jiwa (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2023a). Jumlah masyarakat angkatan kerja pada usia produktif mampu mencukupi ketersediaan lowongan kerja yang ada dan berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas pembangunan manusia dalam aspek ketenagakerjaan (Anfasa, 2021). Di sisi lain, banyaknya masyarakat angkatan kerja yang tidak didukung oleh kebijakan ketersediaan lowongan pekerjaan dan keterampilan khusus dalam bekerja akan menciptakan tingkat pengangguran terbuka di daerah, menurunkan IPM dan perekonomian tidak mengalami pertumbuhan di daerah.

Pertumbuhan ekonomi di Keresidenan Banyumas bukan hanya meningkatkan modal fisik berupa infrastruktur, tetapi juga meningkatkan modal manusia dalam bentuk pembangunan manusia. Pembangunan manusia dapat diinvestasikan dalam berbagai aspek kehidupan salah satunya aspek pendidikan. Aspek tersebut memberikan partisipasi yang penting dalam pertumbuhan ekonomi, karena masyarakat nantinya dapat mengadopsi teknologi yang semakin maju dan meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan (Todaro & Smith, 2011). Indikator pendidikan menjadi salah satu bagian pengukuran IPM di Indonesia, yang dapat diukur dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). RLS di Keresidenan Banyumas, Jawa Tengah, dan Indonesia disajikan pada Gambar 1.

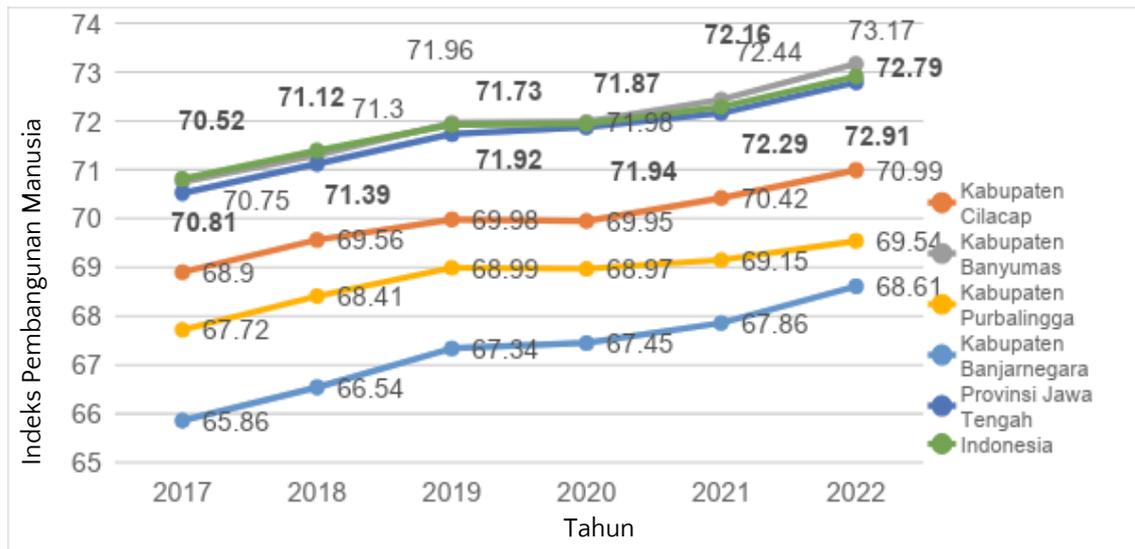


Gambar 1: RLS di Wilayah Keresidenan Banyumas, Jawa Tengah dan Indonesia tahun 2017-2022.

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022b

Berdasarkan data BPS (2022b) Nilai RLS di setiap wilayah Keresidenan Banyumas memiliki nilai yang berbeda pada kurun waktu 6 tahun, dari tahun 2017 sampai 2022 (Gambar 1). Nilai RLS di 4 wilayah Keresidenan Banyumas mengalami kenaikan setiap tahunnya. Tahun 2022, nilai RLS di Kabupaten Cilacap sebesar 7,18 tahun, Kabupaten Banjarnegara sebesar 6,84 tahun, Kabupaten Purbalingga sebesar 7,33 tahun, dan Kabupaten Banyumas sebesar 7,78 tahun. Walaupun nilai RLS di Keresidenan Banyumas meningkat setiap tahunnya, tetapi nilai tersebut masih dibawah nilai RLS Jawa Tengah dan Indonesia. Rata-rata nilai RLS di Keresidenan Banyumas masih dibawah 8 tahun, hal ini menandakan masyarakat usia sekolah hanya dapat menempuh pendidikan SMA kelas 1. Masyarakat yang menempuh tingkat pendidikan SMA kelas 1, belum memiliki keahlian dan keterampilan dalam bekerja, sehingga dapat berpengaruh terhadap penurunan kualitas IPM dan peningkatan pengangguran terbuka di Keresidenan Banyumas.

Semakin meningkatnya RLS di masyarakat, maka pertumbuhan ekonomi daerah akan semakin meningkat secara signifikan (Dewi & Sutrisna, 2014; Ezkiriato & Alexandi, 2018; Handayani et al., 2016; Hepi & Zakiah, 2018; Yusuf et al., 2022). Sebaliknya, RLS berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap perekonomian, karena masyarakat akan cenderung memilih pekerjaan yang sesuai keahlian dan penghasilan tinggi (Čadil et al., 2014; Frederich et al., 2023; Giri et al., 2022; Huda & Indahsari, 2021). Peningkatan RLS di Keresidenan Banyumas akan meningkatkan modal manusia dan IPM di daerah. Gambar 2 menunjukkan IPM di Keresidenan Banyumas, Jawa Tengah, dan Indonesia.



Gambar 2: IPM di Wilayah Keresidenan Banyumas, Jawa Tengah dan Indonesia tahun 2017-2022.

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022a

Gambar 2 memperlihatkan IPM di Keresidenan Banyumas cenderung dalam kurun waktu 6 tahun terakhir di 2017-2022 (BPS, 2022a). Indeks IPM tahun 2022, Kabupaten Banyumas senilai 73,17, Kabupaten Banjarnegara senilai 68,61, Kabupaten Cilacap senilai 70,99, dan Kabupaten Purbalingga senilai 69,54. Jika IPM Keresidenan Banyumas dibandingkan dengan IPM Jawa Tengah dan Indonesia, maka terdapat 3 wilayah yang masih dibawah IPM Jawa Tengah dan Indonesia, yaitu: Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Banjarnegara. IPM Kabupaten Banyumas dalam 6 tahun terakhir sudah diatas 70 dan berada dekat dengan IPM Jawa Tengah dan Indonesia. Pada tahun 2022, IPM Kabupaten Banyumas sebesar 73,17 atau melampaui IPM Jawa tengah senilai 72,79 dan IPM Indonesia senilai 72,91.

Kondisi di atas menunjukkan bahwa pembangunan manusia di wilayah Keresidenan Banyumas meningkat, tetapi beberapa wilayah perlu meningkatkan kembali pembangunan manusia dalam berbagai aspek. Peningkatan IPM di berbagai daerah, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke arah yang positif dan signifikan (Arafat et al., 2020; Ezkiriato &

Alexandi, 2018; Garibaldi & Hidayat, 2014; Mulyasari, 2018; Prasetyo & Dinarjito, 2021). IPM yang meningkat menunjukkan keberhasilan dalam 3 indikator yaitu pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran per kapita (Alexander, 2019). IPM juga dapat mempengaruhi penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di tengah masyarakat. TPT yang semakin menurun dapat mempengaruhi perekonomian. Kondisi TPT di Keresidenan Banyumas dan Jawa Tengah disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1: TPT di Keresidenan Banyumas dan Jawa Tengah tahun 2017-2022(*persentase*)

<b>Wilayah</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Kabupaten Cilacap	6.30	7.49	7.24	9.10	9.97	9.62
Kabupaten Banyumas	4.62	4.15	4.17	6.00	6.05	6.05
Kabupaten Purbalingga	5.33	6.02	4.73	6.10	6.05	5.23
Kabupaten Banjarnegara	4.72	3.99	4.44	5.86	5.86	6.38
Provinsi Jawa Tengah	4.57	4.47	4.44	6.48	5.95	5.57

*Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2022*

TPT di wilyah Keresidenan Banyumas cenderung berfluktuatif selama 6 tahun terakhir dari tahun 2017 hingga 2022. Kabupaten Cilacap menghasilkan nilai TPT setiap tahunnya lebih besar dari wilayah Keresidenan Banyuman yang lain dan Jawa Tengah, nilai TPT tahun 2022 mencapai 9,62%. Tahun 2020 semua wilayah mengalami lonjakan peningkatan TPT yang cukup besar, dikarenakan kondisi Pandemi COVID-19 yang melanda wilayah seluruh Indonesia, sehingga banyak masyarakat angkatan kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja. TPT setiap tahunnya di 4 wilayah Keresidenan Banyumas sedikit lebih besar dibandingkan TPT Jawa Tengah. Penurunan TPT mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan di berbagi daerah (Ardian et al., 2022; Desembriarto, 2021; Harjana, 2015; Muminin & Hidayat, 2017; Putri & Subroto, 2016; Qausar & Aminda, 2022).

Berdasarkan uraian permasalahan dan penelitian sebelumnya di atas, peningkatan RLS dan IPM serta fluktuasi TPT setiap tahun, apakah akan memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Keresidenan Banyumas. Kajian indikator RLS, IPM, dan TPT terhadap PDRB di lokasi penelitian belum banyak dianalisis secara bersamaan. Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu periode waktu kajian, jumlah dan jenis data silang objek, dan judul penelitiannya. Sedangkan persamaannya yaitu analisis variabel bebas terhadap varibel terikat yaitu PDRB. Latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis korelasi indikator RLS, IPM, dan TPT terhadap PDRB per kapita di wilayah Keresidenan Banyumas tahun 2017-2022. Temuan ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk membuat rumusan kebijakan yang tepat sasaran dalam sektor pembangunan manusia dan ketenagakerjaan, sehingga masyarakat memperoleh kesejahteraan yang merata.

**METODE**

Penelitian kuantitatif dengan data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik Indonesia dan Provinsi Jawa Tengah. Data panel terdiri dari data deret waktu dan data silang objek. Data deret waktu sekitar 6 (enam) tahun terakhir, dengan periode tahun 2017-2022. Data silang objek penelitian yaitu wilayah Keresidenan Banyumas di Jawa Tengah, terdiri dari: Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Banyumas. Kedua data tersebut menghasilkan 24 data observasi. Perangkat lunak untuk analisis penelitian ini menggunakan EViews 9.0 dan Ms. Excel. Tabel 2 menampilkan definisi operasional setiap variabel penelitian.

Tabel 2: Definisi Operasional Penelitian

Variabel	Definisi Operasional	Satuan	Hipotesis
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Lamanya tahun yang digunakan masyarakat saat melakukan pendidikan	Tahun	Positif dan Signifikan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks pengukuran keberhasilan membangun kualitas hidup masyarakat di daerah	Indeks	Positif dan Signifikan
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Perbandingan banyaknya pengangguran terhadap banyaknya angkatan kerja	Persentase	Negatif dan Signifikan
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	PDRB per kapita pada harga konstan tahun 2017-2022 di Keresidenan Banyumas, Jawa Tengah	Jutaan Rupiah	

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022.

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka kajian ini mampu mendeskripsikan variabel bebas yang terdiri dari RLS, IPM, dan TPT berkorelasi terhadap variabel terikat (PDRB) di Keresidenan Banyumas. Model ekonometrika penelitian dapat menganalisis korelasi antara ketiga variabel bebas dan variabel terikat. Model ekonometrika diadopsi dari (Gujarati et al., 2017), lalu dioptimalkan sesuai kebutuhan penelitian. Permodelan ekonometrika penelitian ini, seperti persamaan (1).

$$\ln PDRB_{it} = \beta_0 + \beta_1 RLS_{it} + \beta_2 \ln IPM_{it} + \beta_3 TPT_{it} + \epsilon_{it} \tag{1}$$

Dimana:

PDRB : PDRB per kapita

$\beta_0$  : Konstanta

$\beta_1 - \beta_3$  : Koefisien regresi

RLS : Rata-rata lama sekolah

IPM : Indeks pembangunan manusia

TPT : Tingkat pengangguran terbuka

$\epsilon$  : Residual

i : Kabupaten di Keresidenan Banyumas  
t : Tahun 2017-2022  
Ln : Logaritma natural

Metode pengolahan data penelitian menggunakan 2 (dua) analisis yaitu regresi data panel dan statistik deskriptif. Statistik deskriptif mampu menggambarkan secara umum dari ciri khas variabel-variabel penelitian, dengan menghitung nilai rata-rata (mean), nilai maksimum, dan nilai minimum (Ghozali, 2016). Nilai yang diperoleh dari penjumlahan semua data di setiap variabel penelitian (RLS, IPM, TPT, dan PDRB) dibagi dengan jumlah semua data di variabel penelitian tersebut merupakan definisi Nilai mean. Nilai maksimum diperoleh dari nilai tertinggi di setiap variabel pada jangka waktu penelitian. Nilai minimum diperoleh dari nilai terendah di setiap variabel penelitian pada jangka waktu penelitian.

Metode regresi data panel mempunyai 3 (tiga) model pendekatan antara lain: *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). CEM adalah merupakan model tersederhana yang mengasumsikan *intercept* dan *slope* pada unit data silang objek dan deret waktu yaitu sama (Gujarati et al., 2017). FEM merupakan model dengan metode LSDV, dengan asumsi *slope* konstan tetapi *intercept* tidak konstan (Gujarati et al., 2017). Model terakhir, REM dapat mengatasi ketidakpastian model FEM, asumsi dalam perbedaan karakteristik silang objek dan deret waktu ditempatkan pada residual dari model (Gujarati et al., 2017). Keputusan terbaik dalam pemilihan ketiga model estimasi tersebut, dilakukan pengujian, antara lain: Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier (Gujarati et al., 2017). Uji Chow adalah pengujian dalam menentukan diantara CEM dan FEM, di analisis sesuai prosedur pengujian Uji Chow. Uji Hausman adalah pengujian dalam menentukan diantara FEM dan REM, di analisis sesuai prosedur pengujian Uji Hausman. Pengujian dalam menentukan diantara antara CEM dan REM merupakan definisi Uji Lagrange Multiplier. Model estimasi terpilih dilanjutkan uji asumsi klasik, sehingga model sesuai dengan kriteria *Best, Linear, Unbiased, dan Estimation* (BLUE).

Model estimasi terpilih diintegrasikan dalam pemeriksaan Uji Serentak, Uji Parsial, dan Koefisien Determinasi. Uji Serentak untuk mengetahui secara simultan korelasi variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu PDRB yang merupakan proxy pertumbuhan ekonomi. Uji Parsial untuk mengetahui secara segmental korelasi antara variabel bebas dan variabel terikat. Sedangkan, Koefisien determinasi untuk memberitahukan baik atau tidaknya model estimasi terpilih dan melihat semampu mana variabel bebas menjelaskan variabel terikatnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Keresidenan Banyumas di Jawa tengah terdiri dari 4 kabupaten yaitu Cilacap, Purbalingga, Banyumas, dan Banjarnegara. Berdasarkan hasil statistik deskriptif dengan data Badan Pusat Statistik dari tahun 2017 sampai 2022 di 4 kabupaten tersebut, diperoleh nilai

rata-rata, maksimum dan minimum. PDRB per kapita di Tabel 3, menunjukkan nilai mean sebesar Rp 27,01 juta, nilai maksimum sebesar Rp 58,37 juta di Kabupaten Cilacap tahun 2019, dan nilai minimum sebesar Rp 14,83 juta di Kabupaten Banjarnegara tahun 2020. RLS sebagai indikator di bidang pendidikan, memiliki nilai mean selama penelitian sebesar 7,06 tahun, sedangkan nilai maksimum dan nilai minimum masing-masing sebesar 7,78 tahun (Kabupaten Banyumas di tahun 2022) dan 6,27 tahun (Kabupaten Banjarnegara di tahun 2017).

IPM untuk menghitung tingkat keberhasilan daerah dan negara dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Berdasarkan Tabel 3 diperoleh indeks rata-rata senilai 69,49, indeks maksimum senilai 73,17 di Kabupaten Banyumas tahun 2022, dan indeks minimum senilai 65,86 di Kabupaten Banjarnegara tahun 2017. TPT untuk mengukur pengangguran terbuka di daerah secara persentase. Nilai TPT rata-rata sebesar 6,06%, nilai maksimum diperoleh Kabupaten Cilacap tahun 2021 sebesar 9,97%, sedangkan nilai minimumnya diperoleh Kabupaten Banjarnegara tahun 2018 sebesar 3,99%.

Tabel 3: Hasil Statistik Deskriptif Penelitian

<b>Variabel</b>	<b>PDRB (Jutaan Rp)</b>	<b>RLS (Tahun)</b>	<b>IPM (Indeks)</b>	<b>TPT (Persen)</b>
Mean	27.01	7.06	69.49	6.06
Maksimum	58.37	7.78	73.17	9.97
Minimum	14.83	6.27	65.86	3.99

Sumber: Data Diolah dengan Ms. Excel (2023)

Hasil pengujian dalam pemilihan model pada Tabel 4, Uji Chow memperoleh *cross-section chi-square* senilai 0,000 ( $< \alpha=5\%$ ),  $H_0$  ditolak, maka menggunakan FEM. Kemudian dilanjutkan Uji Hausman untuk menentukan di antara FEM atau REM. Uji tersebut memperoleh *cross-section random* senilai 0,000 ( $< 5\%$ ),  $H_0$  ditolak, maka modelnya FEM. Hasil pemilihan model menyatakan bahwa *Fixed Effect Model* (FEM) merupakan model yang terbaik yang dapat menjawab hipotesis penelitian.

Tabel 4: Pemilihan Model Regresi Data Panel

<b>Pengujian</b>	<b>Nilai Probabilitas</b>	<b>Keputusan</b>
Uji Chow	0,000	FEM
Uji Lagrange Multiplier	0,000	<b>FEM</b>

Sumber: Data Diolah dengan EViews 9.0 (2023)

Model FEM diuji kembali dengan uji asumsi klasik, sehingga memenuhi kriteria BLUE atau terbebas dari penyimpangan. Uji normalitas untuk memeriksa residual model menyebar secara normal atau tidak. *Jarque-Bera* pada uji normalitas senilai 0,765 ( $< 0,05$ ), artinya data dalam model menyebar secara normal. Uji multikolinearitas melihat antar variabel bebas tidak terjadi korelasi sempurna. Pada Tabel 5, nilai multikolinearitas antar

variabel bebas dibawah 0,85, artinya model ekonometrik penelitian ini bebas dari pelanggaran multikolinearitas. Model FEM terbebas dari gejala heteroskedastisitas, sebab grafik residual masih dibawah batas ketentuan 500 dan -500 dengan nilai sebesar 0,06 dan -0,06. Menurut (Gujarati et al., 2017) bahwa uji autokorelasi tidak wajib untuk pendekatan model FEM. Tabel 5 menunjukkan hasil setiap uji asumsi klasik.

Tabel 5: Hasil Uji Asumsi Klasik

<b>Uji Normalitas</b>			
Nilai <i>Jarque-Bera</i>		0,765	
<b>Uji Multikolinearitas</b>			
	RLS	LNIPM	TPT
RLS	1.000	0.811	0.099
LNIPM	0.811	1.000	0.216
TPT	0.099	0.216	1.000
<b>Uji Heteroskedastisitas</b>			
Grafik Residual		500 > 0,06 dan -0,06 > -500	

Sumber: Data Diolah dengan EViews 9.0 (2023)

Tabel 6 memperlihatkan adj koefisien determinasi senilai 99,30%. Nilai tersebut memperlihatkan besarnya kemampuan variabel RLS, IPM, dan TPT dapat menjelaskan PDRB, sedangkan sisanya 0,70% diterangkan dalam variabel bebas lainnya yang belum dianalisis pada model ekonometrik ini. Uji serentak pada Tabel 6, nilai probabilitas sebesar 0,000 (< 5%), maka  $H_a$  gagal ditolak. Disimpulkan secara simultan, setidaknya terdapat satu variabel bebas yang berkorelasi signifikan terhadap variabel terikat. Hasil estimasi FEM disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6: Hasil Estimasi FEM

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistik	Probabilitas	Keputusan
C	-11.548	6.126	-1.885	0.077	
RLS	0.055	0.095	0.577	0.572	$H_{RLS}$ ditolak
LnIPM	3.474	1.558	2.230	0.040	$H_{IPM}$ diterima
TPT	-0.066	0.012	-5.598	0.000	$H_{TPT}$ diterima
<b>Pemeriksaan Uji Serentak dan Koefisien Determinasi</b>					
Koefisien determinasi				0,995	
Adj Koefisien Determinasi				0,993	
F-statistik				553,745	
Probabilitas (F-statistik)				0,000	

Sumber: Data Diolah dengan EViews 9.0 (2023)

Dengan demikian, persamaan regresi data panel dengan FEM yaitu seperti persamaan (2).

$$\text{LnPDRB}_{it} = -11.548 + 0.055 \cdot \text{RLS}_{it} + 3.474 \cdot \text{LnIPM}_{it} - 0.066 \cdot \text{TPT}_{it} + \epsilon_{it} \quad (2)$$

PDRB per kapita merupakan proksi pertumbuhan ekonomi di daerah. Keresidenan Banyumas di Jawa Tengah memiliki 4 wilayah kabupaten dengan jumlah PDRB per kapita yang berbeda setiap wilayah dan tahunnya. PDRB banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam sektor di kehidupan masyarakat di daerah. RLS sebagai indikator dalam aspek pendidikan di tengah masyarakat Keresidenan Banyumas. Pada Tabel 6, RLS memiliki koefisien senilai 0,055, artinya RLS yang naik sebesar 1 satuan, maka rata-rata PDRB akan meningkat 0.055%, asumsi ceteris paribus. Uji signifikansi RLS diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,572 ( $> 5\%$ ), maka  $H_{RLS}$  ditolak. Dikonklusikan bahwa RLS berkorelasi positif dan tidak signifikan terhadap PDRB yang merupakan proksi pertumbuhan ekonomi. Hasil temuan ini berbeda dengan penelitian Dewi & Sutrisna (2014), Ezkiriyanto & Alexandi (2018), Handayani et al. (2016), Hepi & Zakiah (2018), dan Yusuf et al. (2022) yang melaporkan bahwa RLS akan berkorelasi positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Walaupun demikian, hasil penelitian ini sesuai dengan laporan penelitian yang mengatakan bahwa RLS memberikan korelasi yang negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Frederich et al., 2023; Giri et al., 2022; Huda & Indahsari, 2021). Hasil penelitian ini memberitahukan bahwa semakin lamanya RLS, belum tentu memberikan jaminan dalam memperoleh siswa-siswi yang berkualitas dan meningkatkan perekonomian daerah. Sistem pendidikan di Keresidenan Banyumas dan Indonesia masih terdapat beberapa kelemahan yaitu kurikulum pendidikan yang bersifat teoritis dan kurang memaksimalkan praktikum, sarana dan prasarana penunjang pendidikan masih belum maksimal, dan perubahan kurikulum pendidikan setiap pergantian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Bahkan menurut Čadil et al. (2014), semakin tinggi kualitas SDM akan meningkatkan persentase pengangguran, disebabkan SDM tersebut mencari pekerjaan dengan penghasilan tinggi dan sesuai keahlian ijazah, padahal ketersediaan lowongan pekerjaan dan penghasilan yang diberikan tidak sesuai harapan. Kondisi tersebut mengakibatkan pengaruh lamanya RLS terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah tidak signifikan. Pemerintah daerah di Keresidenan Banyumas perlu membuat kebijakan dalam peningkatan kualitas pendidikan sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

IPM sebagai indikator tingkat keberhasilan pemerintah dalam membangun kualitas hidup masyarakat di daerah dan negara. IPM terdiri dari kondisi kesehatan dan umur panjang, tingkat pendidikan, dan kondisi kehidupan yang layak. Berdasarkan hasil penelitian di Tabel 6, nilai koefisien IPM sebesar 3,474 berarti kenaikan IPM senilai 1 satuan, maka PDRB secara rata-rata akan semakin meningkat sebesar 3,474%, asumsi ceteris paribus. Nilai probabilitas pada pengujian signifikansi sebesar 0,040 ( $< 5\%$ ), maka  $H_{IPM}$  diterima. Hasil temuan ini sesuai dengan hipotesis bahwa IPM memberikan korelasi yang positif dan signifikan terhadap PDRB per kapita di Keresidenan Banyumas.

Hasil temuan ini sama dengan penelitian terdahulu yang mengatakan bahwa IPM dan pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi yang positif dan signifikan di setiap daerah (Arafat et al., 2020; Ezkiriyanto & Alexandi, 2018; Garibaldi & Hidayat, 2014; Mulyasari, 2018; Prasetyo

& Dinarjito, 2021). Merujuk (Alexander, 2019) bahwa indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks pengeluaran yang merupakan komponen IPM yang berpengaruh dalam peningkatan PDRB per kapita. Percepatan perekonomian di suatu negara diperlukan suatu investasi dalam bentuk modal manusia (Todaro & Smith, 2011). Semakin tinggi dan berkelanjutan PDRB di suatu daerah dipicu dengan tingkat pembangunan terhadap manusia yang semakin berkualitas. Pembangunan SDM di Keresidenan Banyumas sudah baik dan tepat, dilihat dari hasil penelitian ini. Pemerintah daerah di 4 wilayah keresidenan terus memberikan inovasi dalam pembangunan manusia ditengah semakin majunya teknologi saat ini dan di masa depan. Inovasi pembangunan manusia yang telah diterapkan yaitu peningkatan kualitas layanan publik sektor kesehatan seperti penambahan gizi dan kalori di masyarakat, pemberian dana bantuan sosial, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sejahtera kepada masyarakat miskin, serta penguatan usaha industri UMKM. Inovasi tersebut dapat meningkatkan pembangunan manusia dan perekonomian semakin meningkat.

TPT untuk mengukur persentase masyarakat yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan terhadap jumlah masyarakat dalam angkatan kerja. Nilai koefisien TPT dari model ekonometrika penelitian sebesar  $-0,066$ , artinya jika kenaikan TPT senilai 1 satuan, maka rata-rata PDRB akan turun senilai  $0,066\%$ , asumsi *ceteris paribus*. Uji Signifikansi menunjukkan nilai probabilitas sebesar  $0,000$ , maka  $H_{TPT}$  diterima. Temuan ini sesuai dengan hipotesis awal penelitian yang memperlihatkan bahwa TPT berkorelasi negatif dan signifikan terhadap PDRB di Keresidenan Banyumas. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ardian et al. (2022), Desembriarto (2021), Harjana (2015), Muminin & Hidayat (2017), Putri & Subroto (2016), dan Qausar & Aminda (2022) yang melaporkan bahwa tingkat pengangguran terbuka dan pertumbuhan ekonomi terjadi korelasi negatif dan signifikan.

Semakin rendah TPT di daerah, maka semakin tinggi pertumbuhan ekonominya, sebaliknya semakin tinggi TPT, maka dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di daerah. Penelitian ini memperlihatkan bahwa PDRB per kapita di Keresidenan Banyumas cukup tinggi dan diikuti dengan penurunan persentase pengangguran terbuka. Menurut Desembriarto (2021) bahwa meningkatnya lowongan pekerjaan, jumlah ekspansi usaha dan UMKM di tengah masyarakat, akan menyerap masyarakat pada angkatan kerja, sehingga mampu mengurangi pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Program-program Dinas Ketenagakerjaan dan dinas terkait lainnya di Keresidenan Banyumas sudah baik dan tepat sasaran dalam mengurangi secara signifikan tingkat pengangguran di tengah masyarakat.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian terkait korelasi Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap pertumbuhan ekonomi di Keresidenan Banyumas, dapat ditarik beberapa kesimpulan dalam

penelitian. Hasil Uji Serentak menyatakan bahwa secara simultan IPM, RLS, dan TPT berkorelasi signifikan terhadap PDRB per kapita. Pada Uji Parsial terdapat 2 variabel bebas yang sesuai dengan hipotesis awal penelitian yaitu IPM dan TPT. IPM berkorelasi atau bernilai positif dan signifikan terhadap PDRB. TPT berkorelasi negatif dan signifikan terhadap PDRB. Sedangkan RLS berkorelasi positif tapi tidak signifikan terhadap PDRB atau hasil penelitian tidak sejalan dengan hipotesis. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurikulum pendidikan Indonesia yang bersifat teoritis dan kurang aplikatif, sarana dan prasarana pendidikan belum optimal, dan perubahan kurikulum pendidikan.

Peneliti memberikan beberapa rekomendasi terkait hasil penelitian ini antara lain, Pemanfaatan bantuan operasional sekolah (BOS) dan pemberian beasiswa bagi siswa-siswi yang kurang mampu, sehingga mereka dapat tetap bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi dan meningkatkan RLS di daerah keresidenan. *Kedua* Pemerintah daerah membuat kebijakan peningkatan dan pemerataan DAK Fisik bidang pendidikan di daerah pedesaan, sehingga sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas dapat terjangkau diseluruh wilayah keresidenan. Pengoptimalan DAK Non fisik bidang pendidikan sesuai tujuannya yaitu untuk meningkatkan kualitas guru dan murid dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, dan tidak menyimpang untuk mendanai kegiatan operasional kantor dan sekolah. Penelitian lanjutan diperlukan dengan mengubah variabel bebas lainnya (Seperti angka harapan hidup, *gini ratio* dan sebagainya) atau metode pengolahan data penelitian, sehingga menghasilkan keragaman ilmu pengetahuan di bidang ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan penentu dasar kebijakan daerah dalam meningkatkan pertumbuhannya.

## **PERNYATAAN RESMI**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada PR Ekonomi Perilaku dan Sirkuler – BRIN yang memberikan dorongan dan bantuan selama berkarir di institusi, Pustakawan Ibu Rulina dalam mencari beberapa artikel serta Bappeda Kabupaten Cilacap yang telah menerima dan mempublikasikan karya tulis ilmiah ini ke Jurnal Inovasi Daerah.

## **REFERENSI**

- Alexander, Y. (2019). Pengaruh Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Investasi dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Jawa Timur Periode 2010-2017. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 8(1), 1–15. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/issue/view/24>
- Anfasa, M. A. (2021). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Angkatan Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten dan Kota di Kalimantan Barat Tahun 2013-2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 10(2), 1–16. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/8157>

- Arafat, L., Wiwiek Rindayati, & Sahara. (2020). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 7(2), 140–158. <https://doi.org/10.29244/jekp.7.2.2018.140-158>
- Ardian, R., Syahputra, M., & Dermawan, D. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia. *EBISMEN: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 1(3), 190–198. <https://journal.unimar-amni.ac.id/index.php/EBISMEN/article/download/90/75>
- Badan Pusat Statistik. (2022a, November 18). *[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia, 2010-2022*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/indicator/26/413/1/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia.html>
- Badan Pusat Statistik. (2022b, November 18). *[Metode Baru] Rata-rata Lama Sekolah, 2010-2022*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/indicator/26/415/1/-metode-baru-rata-rata-lama-sekolah.html>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Indeks Pembangunan Manusia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2022, December 21). *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), 2007-2022*. Semarang: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. <https://jateng.bps.go.id/indicator/6/64/1/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2023a, January 16). *Jumlah Angkatan Kerja, 2009-2022*. Semarang: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. <https://jateng.bps.go.id/indicator/6/82/1/jumlah-angkatan-kerja.html>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2023b, March 9). *[Seri 2010] PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2010-2022*. Semarang: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. <https://jateng.bps.go.id/indicator/157/1747/1/-seri-2010-pdrb-per-kapita-atas-dasar-harga-konstan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah.html>
- Čadil, J., Petkovová, L., & Blatná, D. (2014). Human Capital, Economic Structure and Growth. *Procedia Economics and Finance*, 12, 85–92. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(14\)00323-2](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(14)00323-2)
- Desembriarto, D. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Rata-rata Lama Sekolah terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bantul. *Jurnal Riset Daerah Kabupaten Bantul*, 21(4), 4064–4074. <https://ojs.bantulkab.go.id/index.php/jrd/article/view/64>
- Dewi, N. L. S., & Sutrisna, I. K. (2014). Pengaruh Komponen Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 3(3), 76–123. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/view/8161>
- Ezkirianto, R., & Alexandi, M. F. (2018). Analisis Keterkaitan Antara Indeks Pembangunan Manusia dan PDRB Per Kapita di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 2(1), 14–29. <https://doi.org/10.29244/jekp.2.1.2013.14-29>
- Frederich, R., Nurhayati, & Purba, S. F. (2023). Peranan Pendidikan Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 28(1), 69–83. <https://doi.org/10.35760/eb.2023.v28i1.7227>

- Garibaldi, M., & Hidayat, P. (2014). Analisis Hubungan IPM dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 2(1), 562–572. <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/edk/article/view/11717>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS 23* (3rd ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Giri, N. K. O., Yasa, P. N. S., & Jayawarsa, A. A. K. (2022). Pengaruh Komponen Indeks Pembangunan manusia Terhadap Pertumbuhan ekonomi Kabupaten / Kota di Bali Tahun 2012-2019. *Warmadewa Economic Development Journal (WEDJ)*, 5(2), 31–39. <https://doi.org/10.22225/wedj.5.2.2022.31-39>
- Gujarati, D., Porter, D., & Gunasekar, S. (2017). *Basic Econometrics* (5th ed.). New York: McGraw Hill Education.
- Handayani, P. N. S., Bendesa, I. K. G., & Yuliarmi, N. N. (2016). Pengaruh jumlah penduduk, angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan PDRB perkapita terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 5(10), 3449–3474. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/article/view/22861>
- Harjana, L. I. (2015). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Belanja Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Pada 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 3(2), 1–18. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/2100/1921>
- Hepi, H., & Zakiah, W. (2018). Pengaruh Angka Harapan Hidup Dan Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap PDRB Perkapita Serta Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2015. *Jurnal Magister Ilmu Ekonomi Universitas Palangka Raya*, 4(1), 56–68. <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/jgr/article/download/2277/2032/5238>
- Huda, N., & Indahsari, K. (2021). Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup dan Pengeluaran Perkapita Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2018. *Buletin Ekonomika Pembangunan*, 2(1). <https://doi.org/10.21107/bep.v2i1.13849>
- Mirza, D. S. (2011). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap IPM Jawa Tengah. *JEJAK: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan*, 4(2), 102–113. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jejak.v4i2.4645>
- Mulyasari, A. (2018). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Angkatan Kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto. *Economics Development Analysis Journal*, 5(4), 368–376. <https://doi.org/10.15294/edaj.v5i4.22174>
- Muminin, M. A. M., & Hidayat, W. R. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(3), 374–384. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jie/article/download/6164/5619/0>
- Prasetyo, T. A., & Dinarjito, A. (2021). Analisis pengaruh dana desa dan indeks pembangunan manusia per kabupaten/kota terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(4), 375–391. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i4.336>
- Putri, D. A., & Subroto, W. T. (2016). Analisis Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Timur Tahun 2003-2014. *Economic Education Analysis Journal*, 5(1), 1–8. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj/article/view/22174>

- Qausar, N., & Aminda, R. S. (2022). Determinan Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau. *Journal Of Development Economic and Digitalization*, 1(1), 38–50.  
<https://stiemuttaqien.ac.id/ojs/index.php/OJS/article/download/822/581>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Pembangunan Ekonomi* (9th ed.). Jakarta: Erlangga.
- Yusuf, M. Z., Hidayati, N., Wibowo, M. G., & Khusniati, N. (2022). Pengaruh Pendidikan dan IPM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 19(1), 25–38.